

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI KABUPATEN BARRU

LOCAL GOVERNMENT POLICY FOR INCREASING RICE PRODUCTION IN BARRU

Faisal Idris⁽¹⁾ Darmawan Risal⁽²⁾

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru⁽¹⁾
Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia⁽²⁾

Email: Faisalidris1987@gmail.com⁽¹⁾ Darmawanrisal09@gmail.com⁽²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan produksi padi di Kabupaten Barru. Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi Kecamatan di Kabupaten Barru, yaitu Kecamatan Barru dan Kecamatan Tanete Riaja yang berlangsung selama empat bulan terhitung dari bulan Desember 2015 sampai Maret 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan analisis deskriptif kualitatif selanjutnya dianalisis dengan model analisis isi (*content analysis*) dan analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*). Konsistensi Kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru 2011-2015 dalam peningkatan produksi padi memiliki hanya 67%. Konsistensi antara kebijakan dengan program pertanian di dua kecamatan tidak seluruhnya ada keselarasan dengan kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Hasil analisis yang terjabarkan dalam program hanya 75% sedangkan kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan yang tidak terjabarkan sebesar 25%. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan produksi yang cukup tinggi yang mencapai 37,01%. Pada pertanaman yang sama terjadi kekeringan ringan seluas 379 ha atau sebesar 15,05%, kekeringan sedang seluas 756 ha atau sebesar 30,03%. Indikator probabilitas usaha tani menunjukkan usaha tani padi Kabupaten Barru memiliki keuntungan positif. Kondisi ini berarti usahatani pada Kabupaten Barru tetap memperoleh keuntungan sebesar 13,03 juta rupiah. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan produksi padi di Kabupaten Barru

Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, Produksi

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of local government policies to increase rice production in Barru Regency. This research was conducted at two Subdistrict locations in Barru District, namely Barru Subdistrict and Tanete Riaja Subdistrict, which lasted for four months from December 2015 to March 2016. This study used a qualitative descriptive analysis approach and then analyzed with a content analysis model. and PAM (Policy Analysis Matrix) analysis. Policy consistency shows that the 2011-2015 Barru District Government in increasing rice production has only 67%. The consistency between policies and agricultural programs in the two districts is not entirely in line with the policies of the Agriculture and Plantation Office. The results of the analysis described in the program are only 75% while the policies in the Agriculture and Plantation Service Agency's Renstra are not elaborated at 25%. The policy carried out by the government shows that production is quite high, reaching 37.01%. In the same cropping there was a mild dryness of 379 ha or as much as 15.05%, moderate drought as large as 756 ha or as much as 30.03%. Indicator of farming probability shows that Barru District's rice farming has a positive advantage. This condition means farming in Barru Regency continues to make a profit of 13.03 million rupiah. The policies adopted by the local government have not been fully able to increase rice production in Barru District.

Keywords: Effectiveness, Policy, Production

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu program yang termuat dalam Permentan No. 03/Permentan/OT.140/2/2015. Program ini dilaksanakan dengan tujuan menjamin ketahanan dan kemandirian pangan nasional, (Suharno, 2016). Selain itu, kebijakan lainnya terdapat dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan baik pada tingkat rumah tangga, daerah maupun nasional.

Kebijakan terhadap masalah pangan selalu merupakan masalah yang sensitif. Sering terjadi gejolak politik karena dipicu oleh kelangkaan dan naiknya harga pangan, khususnya pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, ketika komoditas padi memiliki daya saing, maka akan diikuti dengan peningkatan produksi dalam negeri, pendapatan petani dan penambahan devisa dan perdagangan internasional, Dewi, 2013). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pangan bukan sekedar komoditas ekonomi tetapi juga menjadi komoditas politik yang memiliki dimensi sosial yang luas.

Seiring dengan hal tersebut maka kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan tetap memprioritaskan kegiatan peningkatan produksi padi sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan khususnya pada wilayah/kabupaten dengan potensi sawah yang strategis seperti di Kabupaten Barru. Kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya penguatan ketahanan pangan wilayah.

Kabupaten Barru menempatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, luas lahan sawah di Kabupaten Barru tahun 2010 adalah 13.218 ha, yang meliputi irigasi setengah teknis 1.458 Ha, irigasi sederhana 1.529 Ha, irigasi desa/non PU 2,124 Ha dan tadah hujan 8.107 Ha. Sejalan dengan penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, produksi padi di wilayah ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2010 produksi padi sebesar 100.646,99 ton. Dari capaian produksi luasan tersebut, 35% diperoleh dari dua Kecamatan Potensial yaitu Kecamatan Tanete riaja dengan luasan 2.083 Ha dan Kecamatan Barru 2.625 Ha. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah di Kabupaten Barru yang ditandai kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 49,22 persen pada tahun 2010, (BPS Kabupaten Barru, 2016.)

Sejalan dengan beberapa kendala yang terjadi pada sistem pertanian, langkah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru, menetapkan enam kebijakan umum di bidang pertanian, yaitu: (1) desentralisasi pelayanan pertanian dan pemberdayaan sumberdaya pertanian, (2) Peningkatan produktivitas usaha pertanian, (3) pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, (4) pengembangan hubungan kemitraan di bidang pertanian dengan pihak ketiga, (5) pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, (6) pemberdayaan masyarakat tani yang berbasis kemandirian lokal.

Mengingat Kabupaten Barru sebagai wilayah agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan strategi untuk pengembangan berbagai program pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Barru ingin meminimalisir kendala dan semakin meningkatkan produksi dengan menetapkan kebijakan (1) Pembangunan infrastruktur pertanian, (2) Pengadaan alat dan mesin pertanian, (3) Intalasi benih dan (4) Penggunaan varietas padi yang bermutu.

Berdasarkan beberapa kondisi yang terjadi saat ini melalui penerapan kebijakan pertanian khususnya padi, maka penelitian terhadap keempat kebijakan

pemerintah daerah terhadap peningkatan produksi padi dan dampaknya di lapangan perlu diketahui melalui beberapa pendekatan dan analisis data di lapangan. Penelitian ini juga tentunya akan menjadi tolak ukur keberhasilan rencana yang telah diprogramkan dan menjadi acuan untuk penerapan kebijakan selanjutnya oleh pemerintah daerah dan sejalan dengan program Povinsi dan nasional.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru dengan memilih dua Kecamatan yaitu Kecamatan Barru dan Kecamatan Tanete Riaja. Lokasi yang dipilih merupakan wilayah dominan pertanaman padi dengan arahan pengembangan prioritas pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data produktivitas tahun 2015 untuk mengetahui pengaruh kebijakan yang terjadi dalam satu tahun kegiatan. Pengambilan sampel dan analisis data dilakukan selama kurang lebih empat bulan yaitu April sampai dengan Juli 2018. analisis data yang digunakan merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Barru pada periode pemerintahan 2011-2015.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petani padi sawah penerima bantuan dari pemerintah daerah yang ada di Kecamatan Barru dan Tanete Riaja pada tahun 2015. Bantuan yang diterima berdasar pada kebijakan bantuan Pengadaan alat dan mesin pertanian. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 6 kelompok/orang petani penerima bantuan pemerintah musim tanam 2015-2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling atau sampel yang ditentukan berdasarkan identifikasi dan ciri-ciri tertentu.

Metode dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan untuk menilai implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan produksi selanjutnya dianalisis dengan model analisis isi (*content analysis*). Untuk menganalisa kebijakan terkait dampak dari usaha tani yang telah

dilakukan maka diharuskan untuk menganalisis input output usahatani yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengambil asumsi harga yang berlaku pada masyarakat di Kabupaten Barru.

Penelitian ini juga menggunakan alat analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*). Alat analisis PAM dikembangkan oleh (Mongke dan Pearson, 1989). Analisis PAM digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat memperbaiki daya saing terhadap usahatani suatu komoditi yang dihasilkan melalui penciptaan efisiensi usaha dan pertumbuhan pendapatan.

HASIL

Analisis Konsistensi Kebijakan (Tabel 1) menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru 2011-2015 dalam peningkatan produksi padi memiliki acuan konsistensi hanya 67%.

Tabel 1. Matriks Analisis Konsistensi Kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru 2011-2015 terhadap Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru

Kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kebijakan Dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan						Ada/ Tidak ada Kesesuaian
	A*)	B*)	C*)	D*)	E*)	F*)	
1. Pembangunan Infrastruktur Pertanian	-				1	-	Ada
2. Pengembangan alat mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian	-				1	-	Ada
3. Intalasi Benih	-			1			

4. Penggunaan Varietas Padi yang Bermutu	-	1		
Ket : (Ada/Tidak ada Kesesuaian)	Ada	Ada	Ada	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

A*) :Desentralisasi pelayanan pertanian dan pemberdayaan sumber daya pertanian.

B*) :Peningkatan produktivitas usaha pertanian.

C*) :Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, antara lain dengan model kawasan agropolitan.

D*) :Pengembangan hubungan kemitraan di bidang pertanian dengan pihak ketiga.

E*) :Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian.

F*) :Pemberdayaan masyarakat tani

Keterangan:

1 = Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Renstra Kabupaten

- =Kebijakan dalam Renstra Kabupaten tidak dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan

Analisis

0. Dari 6 kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian memiliki kesesuaian terhadap Renstra Kabupaten Barru terhadap peningkatan produksi padi yang diberi kode 1= 6

1. Hasil : Kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian memiliki kesesuaian dengan Kebijakan dalam Renstra Kabupaten Barru = $\frac{4}{6} \times 100\% = 67\%$

Analisis Konsistensi antara kebijakan dengan program pertanian tahun 2015 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru dalam peningkatan produksi di dua kecamatan tidak seluruhnya ada keselarasan dengan kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Tabel 2). Dari hasil analisis yang terjabarkan dalam program hanya 75%. Sedangkan kebijakan dalam Renstra Dinas

Pertanian dan Perkebunan yang tidak terjabarkan sebesar 25%. Dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan produksi yang cukup tinggi yang mencapai 37,01%. Dalam penerapan kebijakan terdapat kendala kekeringan ringan seluas 379 Ha atau sebesar 15,05%. Sawah yang mengalami kekeringan sedang seluas 756 Ha atau sebesar 30,03%

Tabel 2. Matriks Analisis Konsistensi antara kebijakan dengan program pertanian tahun 2015 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru dalam peningkatan produksi di Kecamatan Barru dan Kecamatan Tanete Riaja.

Program	Kebijakan Dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan				Ada/ Tidak ada Kesesuaian
	A*)	B*)	C*)	D*)	
1. Pembangunan jaringan irigasi baru dan tradisional	1				Ada
2. Pembagian alsintan berupa traktor dan mesin pompa air		1			
3. Penggunaan benih unggul			1		Ada
4. Penggunaan pupuk urea, SP 36, KCL dan					

Pupuk Organik	-				Ada
Ket: (Ada/Tidak ada Kesesuaian)	Ada	Ada	Ada	-	Ada
Sumber: Hasil olahan data primer, 2018.					
A*) : Pembangunan Infrastruktur Pertanian					
B*) : Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian					
C*) : Intalasi Benih					
D*) : Penggunaan Varietas Padi yang Bermutu					
Keterangan:					
1 = Program sesuai dengan kebijakan					
- = Tidak ada program pada kebijakan					
Analisis					
1. Dari 6 kebijakan pada Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan hanya melahirkan 3 program, ada 3 kebijakan yang tidak memiliki program					
2. Hasil : Kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian memiliki kesesuaian dengan program = $\frac{3}{4}$					
$\times 100 \% = 75 \%$					

Analisis produksi (Tabel 3) yang diambil terdapat empat responden memiliki selisih produksi paling rendah sebesar 0,5 ton dan dua responden memiliki selisih produksi yang tinggi sebesar 2 ton dari musim tanam gadu. Indikator probabilitas usaha

tani menunjukkan usahatani padi Kabupaten Barru memiliki keuntungan positif. Kondisi ini berarti usahatani pada Kabupaten Barru tetap memperoleh keuntungan sebesar 13,03 juta rupiah.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Peningkatan Produksi Padi Pada Musim Tanam Gadu Menggunakan Pompa Air dan Musim Rendengan Tidak Menggunakan Pompa Air Tahun 2015

No.	Responden	Luas Tanam (ha)	Produksi Musim Tanam (ton)		Selisih Produksi (ton)
			Gadu	Rendengan	
1.	Rustan	1	4,5	5	0,5
2.	Nangkan	1	2,5	3	0,5
3.	Sahirin	1	3,5	4	0,5
4.	Bahru	1	3,5	4	0,5
5.	Darwin	2,5	8	10	2
6.	Alyas	2	7	9	2
J u m l a h		8,5	29	35	6

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

PEMBAHASAN

Kebijakan dalam peningkatan produksi padi oleh pihak pemerintah

Kabupaten Barru belum signifikan. Terdapat beberapa kendala lapangan yang menjadi faktor masalah utama yang belum

menjadi perhatian utama pemerintah daerah khususnya dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Barru. Selain itu, ada beberapa bagian kebijakan pemerintah daerah yang tidak dicantumkan ke dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan, yakni penanggulangan lahan kritis dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pada padi. Hal ini disebabkan karena kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, antara lain dengan model kawasan agropolitan; pengembangan hubungan kemitraan di bidang pertanian dengan pihak ketiga; pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian khususnya pengadaan bibit unggul dan pupuk tidak termasuk dalam program.

Secara umum, berkaitan dengan tingkat produksi padi pada tahun 2015 mengalami kondisi fluktuatif. Selain itu pula terjadinya penurunan produksi padi pada tahun 2015 di Kabupaten Barru disebabkan oleh lahan fuso dan terkena dampak kekeringan pada musim tanam Gadu. Sawah yang mengalami kekeringan sedang, seluas 756 Ha atau sebesar 30,03%. Kondisi ini tentu mempengaruhi produktivitas padi tahun 2015 di Kabupaten Barru. Situasi ini sudah diperkirakan oleh banyak ahli sejak dua dekade yang lalu, bahwa wilayah di bagian Asia Tenggara mempunyai curah hujan

yang tinggi, namun terdapat daerah yang akan mengalami defisit air karena terjadinya pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang menyebabkan adanya kompetisi penggunaan air yang ketat antara pertanian dan sector lain seperti industri dan perumahan (Bantacut, 2012). Namun pada tahun yang sama pula terdapat kebijakan dari pemerintah bahwa lahan sawah yang terkena dampak kekeringan akan memperoleh subsidi dari pemerintah berupa penggantian kerugian pertanaman dari setiap luasan yang gagal akibat kekeringan.

Terjadinya dampak kekeringan disebabkan oleh terjadinya musim kemarau panjang yang dimulai sejak bulan Juli hingga Desember 2015 dan tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) antara lain; tikus, walang sangit, tungro, ulat grayak, dan keong mas yang merusak pertanaman padi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa penggunaan alat mekanisasi seperti pompa pada musim gaduh memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Menurut (Purwantini, 2016) masuknya alat panen berupa mesin pemanen dan lainnya, dapat mengubah pengelolaan kelompok panen dan dapat juga mengubah alat yang digunakan oleh kelompok tani tersebut sehingga mempengaruhi produksi hasil tanam.

Jumlah selisih penggunaan pompa air sebesar 6 Ton. Penggunaan pompa air untuk musim tanam gadu 2015 pada kelompok tani disepakati berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, mengenai sewa jasa pompa air dan sistem penggunaannya.

Analisis indikator probabilitas usaha tani menunjukkan usahatani padi Kabupaten Barru memiliki keuntungan positif. Kondisi ini berarti usahatani pada Kabupaten Barru tetap memperoleh keuntungan sebesar 13,03 juta rupiah. Keuntungan ini diperoleh dari adanya kebijakan pemerintah pada beberapa sektor produksi seperti jaringan irigasi, bantuan traktor dan benih unggul. Selain itu, usahatani padi Kabupaten Barru memperoleh keuntungan atas biaya aktual sebesar 24,57 juta rupiah dalam kondisi terdapat kebijakan pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi bahwa usahatani padi Kabupaten Barru mampu melakukan ekspansi. Dari hasil keuntungan tersebut di atas, maka keuntungan petani tersebut di atas bisa lebih tinggi apabila penggunaan input sesuai dengan rekomendasi dan subsidi yang diberikan lebih merata (Jakiyah, 2016).

I. KESIMPULAN

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah cukup efektif dalam peningkatan produksi padi di Kabupaten Barru. Kondisi ini ditandai dari keuntungan yang telah diperoleh dan kemampuan untuk tetap bertahan. Namun akan sangat menopang jika pada kondisi tertentu terdapat kebijakan yang menyeluruh dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, R. 2013. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi sawah inbrida dan hibrida di Provinsi Lampung. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (SEPA)* 10(1):11-18.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Barru Dalam Angka. Kabupaten Barru.
- Bantacut, T. 2012. Produksi Padi Optimum Rasional: Peluang dan Tantangan. *Pangan*. Vol 21 No 3 September. 281-295.
- Dewi, H. E., Koestiono, D. & Suhartini, 2013. Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Pengurangan Subsidi Input Terhadap Pengembangan Komoditas Kentang di Kota Batu. *Habitat*, XXIV(2), pp. 86-95.
- Jakiyah, U., Baga, L. M. & Tinnaprilla, N., 2016. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Tani Beras Organik di Provinsi Jawa Barat. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 10(1), pp. 129-146.

- Monke, E. & Pearson, E., 1989. The Policy Analysys Matrix for Agricultural Developement. London: Cornell University Press.
- Purwantini TB, Saptana, Zakaria AK, Sunarsih, Gunawan E. 2016. Dampak Teknologi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani. Laporan Akhir Analisis Kebijakan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Suharno, Nalinda R. 2016. Increase Rice Productivity Trought Models Of Cropping System And The Use Hybrid Varieties. Proceeding 379-385. Muhammadiyah University. Yogyakarta.
- International Conference on Agribusiness Development For Human Welfare.